

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Sistem Kepolisian pada suatu Negara di pengaruhi oleh sistem politik serta *control social* yang di terapkan. Berdasarkan penetapan Pemerintah No.11/S.D Kepolisian beralih status menjadi jawatan tersendiri dibawah Presiden langsung. Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri (Humas Polri). Polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada Masyarakat karena menegakan wibawa hukum. Selain itu polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum Sartin (2019).

Sebagai lembaga yang mengemban tugas seperti yang tercantum di UU No.2 Tahun 2002 Pasal 13 dan 14 bahwa Polri memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, mengakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, polisi bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan kebutuhan, menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam kasus tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya (UU RI Nomor 2, 2002).

Untuk terlaksananya tugas pokok secara merata di seluruh daerah maka polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayah. Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mabes

Polri), sedangkan Polri tingkat ke wilayah disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan (Humas Polri).

Polisi wanita atau yang biasa disebut polwan dibentuk pada tanggal 1 September 1948, pada saat itu terjadi serbuan Belanda yang kedua di kota Bukit Tinggi sehingga berlangsung pemeriksaan darurat yang dilakukan pemerintah terhadap para pengungsi namun pengungsi perempuan tidak mau digeledah oleh aparat keamanan laki-laki karena kejadian tersebut pemerintah Indonesia mendirikan Akademi Kepolisian Wanita (Utari & Arisandy, 2024) Tugas dan fungsi Polri sebagai alat penegak hukum, pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, membina dan mewujudkan kamtibmas, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan jabaran teori tugas dan fungsi Polwan sebagai bagian integral dari Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) (Markuwati dkk. 2015)

Kode etik profesi Kepolisian menjadi panduan bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (Destiani,2023). Sebagai aparat penegak hukum, menangani insiden kekerasan terhadap perempuan serta anak, melayani serta mengembangkan komunitas, melakukan patroli khusus guna perempuan serta anak yang berisiko mengalami kejahatan, memberikan keamanan di area publik, pendampingan

ketertiban lalu lintas, penyidikan kasus pidana yang lebih kompleks serta memerlukan keahlian perempuan (Utari & Arisandy, 2024).

Polisi merupakan pekerjaan yang penuh dengan resiko karena sering dihadapkan dengan peristiwa yang membahayakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain apalagi keluarga juga bisa terbawa. Tidak jarang terjadi insiden yang membahayakan personel hingga dapat mengancam nyawa (Setyowati, 2021). Begitu banyak tuntutan yang mesti dilaksanakan seorang polwan, bahkan dapat mengancam keselamatan diri mereka, seperti luka-luka dan tewas saat menjalani tugas, banyaknya musuh terutama para pelaku kejahatan (Rahajo, 2015)

Berdasarkan data yang diperoleh dari SDM Polda Kalimantan tengah pada saat observasi dan wawancara, secara keseluruhan polwan berjumlah 482 personel. Polwan di Polda Kalimantan Tengah yang melaksanakan tugasnya harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang tidak menentu untuk turun ke masyarakat.

Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan bersama pakor polwan Polda Kalimantan Tengah, jika salah satu anggota polwan di Polda Kalimantan Tengah pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI ketika anggota polwan melakukan patroli, hal tersebut langsung ditangani oleh Jenderal TNI. Selain itu terdapat banyak masalah yang bermunculan di masyarakat semakin membuat polwan kewalahan, salah satunya konflik lahan sawit antara perusahaan dan masyarakat didaerah tersebut, sehingga polwan diminta untuk turun ke lokasi guna memberikan kegiatan bermain bersama anak-anak yang terdampak unjuk rasa agar anak-anak tidak merasakan trauma.

Permasalahan lain yang sering dijumpai yaitu ketika laporan yang masuk dan harus ditanggapi dengan cepat sangat menyita waktu dan jam istirahat terutama untuk polisi wanita yang sudah menikah akan merasakan kesulitan dalam membagi waktu kepada keluarga dan pekerjaan. Polwan dituntut untuk bangun pagi dan berangkat bekerja bersamaan dengan urusan rumah tangga dilanjutkan dengan pekerjaan di kantor yang tidak tentu untuk jam pulang sehingga keluarga sering kali terabaikan, hal tersebut terjadi setiap hari dan berulang.

Hal yang dirasakan oleh polisi wanita sebagai wanita pekerja bagaimanapun juga mereka adalah ibu rumah tangga yang sulit lepas begitu saja dari lingkungan keluarga, karena wanita mempunyai beban dan hambatan lebih berat dibanding rekan prianya, dalam arti wanita harus lebih dahulu mengatasi urusan keluarga, suami, anak dan hal-hal lain yang menyangkut rumah tangga (Yusri & Farida, 2019).

Seorang polwan dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaannya terdapat gangguan atau masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor psikologis, misalnya wanita itu merasa bersalah telah meninggalkan keluarganya untuk bekerja, tertekan karena terbatasnya waktu dan beban pekerjaan terlalu banyak serta situasi kerja yang kurang menyenangkan (Markuwati, 2015). Selain itu, menurut Baron (2000) menjelaskan bahwa faktor stress kerja salah satunya yaitu gejala perilaku, misalnya perasaan khawatir, tidak berdaya, tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi, gelisah, tidak termotivasi untuk bekerja, kesulitan berkonsentrasi, sulit membuat keputusan dan kehilangan kreativitas.

Siagian (2015) mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang.

Robbins & Judge (2017) menyatakan bahwa stres kerja karyawan merupakan suatu keadaan yang muncul dari hubungan antara manusia dan pekerjaan serta sehingga memicu terjadinya penyimpangan. Stres dapat diartikan sebagai suatu emosi negatif yang timbul di dalam diri seorang yang sedang menghadapi tekanan atau seseorang yang beradaptasi dengan lingkungan baru (Piperopoulos, 2016). Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom, antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan (Mangkunegara, 2017).

Stres sudah pasti menimbulkan dampak negatif. Zafar & qadoos (2015) mengatakan bahwa stres terbagi dua, yaitu Eustress (stres yang dapat merangsang kinerja seseorang dan secara positif dapat mendorong karyawan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik) dan distress (stres yang menghasilkan efek negatif pada kesehatan dan kinerja karyawan) Ketika tubuh mampu menggunakan stres yang dialami untuk membantu melewati sebuah hambatan dan meningkatkan performa stres tersebut bersifat positif, sehat dan menantang.

Robbins & Judge (2017) bahwa stress kerja adalah suatu reaksi yang muncul dalam interaksi antara manusia dengan pekerjaan berupa fisik dan psikologis yang dipersepsikan sebagai hal yang mengancam. Pada umumnya stres berupa stimulus dari luar yang mengacaukan fungsi fisik dan psikologis dalam tubuh individu. Stres

dapat diartikan sebagai suatu emosi negatif yang timbul di dalam diri seseorang yang sedang menghadapi tekanan, atau seseorang yang sedang beradaptasi dengan lingkungan baru (Piperopoulos, 2016) Lebih lanjut, Luthans & Fred (2014) mengatakan bahwa stres kerja merupakan suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individual atau proses psikologis yakni suatu konsekuensi dari setiap tindakan lingkungan, peristiwa yang terlalu banyak menuntut hal-hal di luar batas kemampuan fisik dan psikologis individu. Stres kerja yang dialami tidak lepas dari interaksi pada lingkungannya, lingkungan sekitar dalam proses interaksi tersebut.

Pada penelitian terdahulu oleh Ismiati & Zusmawati (2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum stress kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja polisi wanita di Polresta Padang. Penelitian tentang stres pada anggota kepolisian juga pernah dilakukan di Indonesia yaitu di Polres Bangka didapatkan gambaran tingkat stres pada anggota kepolisian sebesar 71%. Secara keseluruhan, prevalensi stres pada anggota kepolisian yaitu berkisar 30-70%, dan sekitar 46.3 % anggota polisi yang mengalami stress adalah anggota polisi wanita (Abdulghani, 2017)

Peneliti mengambil data awal dengan melakukan wawancara langsung pada tanggal 2-3 september 2023 pada sepuluh orang polisi wanita yang bekerja di polda Kalimantan Tengah berdasarkan aspek dari Robbins & Judge (2017).

Dari hasil wawancara, tujuh subjek mengalami gejala fisiologis seperti gangguan pencernaan, detak jantung meningkat, gangguan pernafasan, otot kaku dan kepala terasa sakit berlebih ketika mendapati pekerjaan yang menumpuk dan

urusan rumah tangga yang belum diselesaikan. Lalu pada aspek psikologis, delapan subjek menjelaskan bahwa mudah mengeluarkan emosi negatif ketika banyak mendapatkan tuntutan, merasakan cemas karena merasa tidak maksimal melakukan sebuah pekerjaan dan urusan rumah tangga karena mengerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan, bahkan jika sedang kelelahan cenderung mudah tersinggung kepada rekan kerja. Aspek selanjutnya gejala perilaku yang muncul pada enam subjek mengalami gangguan tidur dan meningkatnya rasa malas dalam melakukan pekerjaan juga mengurus rumah tangga. Beban dari rumah dan kantor muncul secara bersamaan, sulit dalam membagi waktu dan memiliki pekerjaan yang menumpuk adalah faktor dari stress, sehingga gejala psikis yang ditemukan yaitu mudah lelah, sakit kepala dan gangguan pencernaan. Gejala berikutnya gejala perilaku merasa malas yang berlebihan dan sulit untuk tidur dengan nyenyak.

Menurut Robbins & Judge (2017) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stres kerja yaitu, faktor lingkungan yaitu ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi level stres di antara karyawan di dalam organisasinya, ketidakpastian merupakan alasan terbesar orang-orang yang memiliki permasalahan dalam mengatasi perubahan organisasional, terdapat tiga tipe ketidakpastian lingkungan yang utama yaitu ekonomi, politik, dan teknologi lalu faktor organisasional, terdapat tiga tuntutan dalam faktor organisasional meliputi tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan interpersonal dan faktor ketiga yaitu Faktor pribadi, faktor ini mencakup permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi pribadi dan karaktersistik kepribadian yang inheren.

Tugas anggota polisi memiliki tekanan yang begitu berat karena tanggung jawabnya tidak hanya pada tugas pokok kepolisian melainkan juga bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga keluarganya dari bahaya yang mengancam (Setyowati & Ulfa, 2020). Menjadi seorang polwan bukanlah tanpa masalah, mereka terpaksa dihadapkan kepada dua hal yang sama penting dan beratnya, keberhasilan sebagai polisi dan kesuksesan membina rumah tangga. Pasalnya, kodrat Polwan sebagai seorang wanita adalah menjadi pendorong bagi suami serta ibu bagi anak-anaknya. Semangat untuk berprestasi dan kesuksesan untuk mencapai karier di kepolisian harus pula diikuti keberhasilan dalam membina kehidupan rumah tangga. Sebagai bagian internal, mereka harus tetap mampu meningkatkan profesionalisme. Bahkan, diharapkan mampu menjadi idola masyarakat di manapun berada, baik di rumah dengan tetangga maupun saat berada dilapangan tugas(Markuwati, 2015).

Polisi adalah sebuah profesi kerja yang bertugas untuk menjamin penegakan hukum dan terjaganya keamanan masyarakat. Terkait dengan tugas penegakan hukum polisi bekerja untuk memerangi kejahatan, yaitu dengan menekan tingkat kejahatan yang terjadi di lingkungan. Melalui sebuah proses penegakan hukum yang objektif (Tri Astuti, 2022)

Sebelum diterima menjadi tugas kepolisian, mereka harus lulus ujian kesehatan fisik dan psikologis sebelum dipekerjakan. Oleh karena itu polisi memulai karir dengan fisik dan mental yang sehat. Akan tetapi, persepsi masyarakat bahwa petugas polisi harus menjadi figur otoritas yang kuat dan pemecah masalah



dapat mempengaruhi kondisi mental karena harus siap untuk menangani situasi apapun (Kaplan, 2018).

Yuliviona (2014) mengatakan bahwa ketika urusan pekerjaan mencampuri kehidupan keluarga akan menyebabkan tekanan yang terjadi pada individu karena harus mengurangi waktu yang dihabiskan dalam pekerjaan untuk menyediakan lebih banyak waktu untuk keluarga, sebaliknya waktu untuk berkumpul bersama keluarga akan menyebabkan kurangnya waktu yang dibutuhkan dalam menangani urusan pekerjaan. Robbins & Judge (2017) mengemukakan bahwa permasalahan keluarga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan stres kerja, (Handayani & Arri, 2014) mengatakan hal yang sama bahwa stress kerja yang terjadi karena ketidakmampuan perempuan dalam menyeimbangkan peran menjadi faktor yang menghambat tercapainya kesejahteraan psikologis

(Siswatiningsih & Wening, 2021) dalam penelitiannya di Polresta Yogyakarta menghasilkan hasil pengujian hipotesis bahwa konflik peran ganda dan stress kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Polwan Polresta Yogyakarta, didukung hasil konflik peran ganda dan stress kerja terhadap kinerja Polwan Polresta Yogyakarta sebesar 25,4% sedangkan sisanya 76,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Hal ini berarti apabila konflik peran ganda semakin bertambah maka semakin menurun kinerja Polwan Polresta Yogyakarta dan sebaliknya jika konflik peran ganda semakin turun.

(Greenhaus & Beutell, 1985) mendefinisikan konflik peran ganda merupakan bentuk konflik antar peran dimana tekanan peran pekerjaan dan keluarga tidak

selaras. Konflik peran ganda adalah suatu bentuk konflik antar peran dimana peran dalam pekerjaan dan keluarga saling bertentangan, karyawan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam menjalankan perannya dalam dunia kerja (pekerjaan) dibandingkan dengan menjalankan perannya dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga ataukah sebagai anggota keluarga (Maryam & Sulistiowati, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah apakah ada hubungan antara konflik peran ganda dengan stres kerja pada polisi wanita di Polda Kalimantan Tengah?

## **B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara konflik peran ganda dengan stress kerja pada polisi wanita di Polda Kalimantan Tengah

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis secara garis besar pada penelitian ini diharapkan dapat memberika sumbangan terhadap ilmu psikologi, terutama pada ilmu psikologi industri dan organisasi, juga memperkaya kepustakaan yang sudah ada dengan menjelaskan lebih jauh tentang konflik peran ganda yang mempengaruhi stress kerja pada polisi wanita.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan upaya untuk mengurangi stres kerja pada polisi wanita dengan diberikan perhatian lebih oleh satuan kerja terkait dan pimpinan, sehingga diharapkan polisi wanita dapat menyeimbangkan sebagai wanita karir dengan seorang ibu didalam keluarga dapat dijalankan dengan baik dan diberikan dukungan secara emosional oleh keluarga dan lingkungan.